

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai dasar-dasar teori yang diperoleh dari beberapa literatur mengenai Evaluasi Kemanfaatan *Sail* Indonesia Untuk Akselerasi Pembangunan Daerah di Kabupaten Pulau Morotai yang menjadi acuan percepatan pembangunan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

2.1. Pemahaman Konsep Wisata Layar (*Sailing Tourism*) dan Destinasi Wisata Layar

Pemahaman konsep wisata layar tidak bisa dipisahkan dari pemahaman akan konsep wisata bahari. Istilah wisata layar dalam penelitian ini digunakan sebagai padanan istilah *sailing tourism* atau *yachting tourism* (Derksen, 2007: 13). Sedangkan istilah wisata bahari digunakan sebagai padanan istilah *marine tourism* (Orams, 2002:9) dan/atau *nautical tourism* (Derksen, 2007:13).

Derksen memasukkan pengertian wisata bahari sebagai suatu aktivitas di waktu luang dimana orang bepergian ke sebuah destinasi wisata baik melalui darat untuk menghabiskan waktu di perairan maupun bepergian melalui perairan untuk menghabiskan waktu luang di daratan. Sehingga yang dibutuhkan dalam wisata bahari adalah perairan ataupun daratan di dekat perairan tempat orang menghabiskan waktu luangnya. Ditegaskannya wilayah yang sukses dalam wisata bahari adalah wilayah yang mempunyai kedua tempat aktivitas baik di perairan maupun di daratan di sekitarnya. Ia juga menggunakan pengertian wisata bahari sebagai aktivitas wisata yang multifungsi dengan penekanan khusus pada komponen-komponen kebaharian. Dua pengertian yang digunakan oleh Derksen menggambarkan keberagaman aktivitas wisata bahari yang tidak saja mencakup aktivitas wisata di perairan laut, namun mencakup aktivitas wisata di jenis perairan lainnya.

Orams (Orams, 2002:9) menjelaskan bahwa wisata bahari meliputi aktivitas rekreasi yang meliputi melakukan perjalanan ke tempat yang memiliki dan berfokus pada lingkungan kebaharian. Menurutnya lingkungan kebaharian (*marine environment*) adalah lingkungan dengan perairan yang mengandung kadar garam dan dipengaruhi oleh pasang. Pengertian ini memberikan penekanan pada aktivitas wisata bahari yang terbatas di perairan laut. Pengertian kebaharian-sebagai sesuatu yang berhubungan dengan laut-

mendapatkan posisi yang lebih tegas. Dibandingkan dengan Derksen, maka Orams lebih menekankan pada lokasi aktivitas rekreasi wisata yaitu di perairan laut.

Sejumlah literatur menyebutkan wisata layar merupakan bagian dari wisata bahari (Pendit, 1986: 40 dan Dahuri, 2009). Selain menggunakan istilah wisata bahari, Pendit juga memakai istilah wisata maritim (marina) atau wisata tirta. Menurutnya, wisata bahari adalah jenis wisata yang banyak dikaitkan dengan aktivitas olahraga di air. Aktivitas itu antara lain memancing, berlayar, fotografi bawah air, berselancar, lomba dayung, berkeliling di taman laut menikmati pemandangan indah di bawah permukaan air, dan aktivitas rekreasi air lainnya baik di danau, sungai, pantai, teluk, atau laut. Secara lebih jelas, Dahuri memasukkan jenis wisata dengan kapal (*pleasure boating*), wisata dengan kapal jenis *yacht* (*ocean yachting*), dan wisata dengan kapal jenis *cruise* (*cruising*) dalam aktivitas wisata bahari.

Jennings (2007) secara khusus membahas wisata layar dalam kaitan dengan wisata tirta (*water-based tourism*). Menurutnya wisata tirta adalah kegiatan wisata yang dilakukan di atau dalam kaitannya dengan sumber daya air, seperti danau, waduk, kanal, sungai, wilayah pesisir laut, laut, samudra, dan di daerah yang diselimuti es (*ice-associated areas*).

Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan, secara tersirat wisata bahari masuk dalam usaha wisata tirta. Wisata tirta merupakan salah satu dari tiga belas jenis usaha pariwisata yang diatur oleh undang-undang. Pengertian tentang wisata tirta dan wisata bahari tidak terdapat dalam undang-undang itu, namun pengertian mengenai keduanya secara tersurat baru muncul dalam Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM. 96/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Wisata Tirta. Dalam peraturan menteri itu tercantum usaha wisata tirta yang selanjutnya disebut dengan usaha pariwisata adalah usaha penyelenggaraan wisata dan olahraga air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersil di perairan laut, pantai, sungai, danau, dan waduk. Selanjutnya yang dimaksudkan dengan wisata bahari adalah penyelenggaraan wisata dan olahraga air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersil di perairan laut. Mengacu pada peraturan ini, wisata bahari merupakan salah satu bidang usaha wisata tirta.

Peraturan menteri itu juga merinci jenis usaha wisata bahari yang meliputi sub-jenis usaha: (a) wisata selam; (b) wisata perahu layar; (c) wisata memancing; (d) wisata selancar; (e) dermaga bahari; dan (f) sub jenis usaha lainnya dari jenis usaha bahari yang ditetapkan oleh bupati, walikota dan/atau gubernur. Dengan demikian wisata perahu layar merupakan salah satu jenis wisata bahari. Dalam penelitian ini istilah wisata perahu layar disamakan dengan istilah wisata layar.

Visit Scotland (dalam Derksen, 2007) memberikan batasan tentang wisata layar sebagai sebuah aktivitas wisata yang meliputi pemanfaatan waktu tertentu dalam kapal wisata. Biasanya jenis kapal *yacht*, *powerboats*, *dinghies* dan *motorbats* (*ocean cruise*-kapal pesiar tidak termasuk). Wisata layar mengacu pada kegiatan wisata yang tujuan utamanya adalah berlayar atau belajar bagaimana berlayar. Wisata layar mempunyai dua kategori yang ditunjukkan oleh jenis kapal yang digunakan: *yacht* yang juga digunakan sebagai tempat menginap atau *dinghy* (sebuah kapal kecil tanpa fasilitas untuk menginap sehingga akomodasi untuk kebutuhan menginap tersedia di darat (*onecaribbean.org*, 2012)). Berdasarkan pemahaman itu, konsep wisata layar yang dimaksudkan dalam penelitian ini hanya mencakup kunjungan kapal wisata asing (*yacht*) ke suatu destinasi wisata tertentu. Kunjungan itu juga mencakup aktivitas menikmati atraksi wisata yang dilakukan di darat. Dalam kasus Kabupaten Pulau Morotai, aktivitas wisata di darat menjadi salah satu atraksi utama yang dilakukan oleh wisatawan yang mengunjungi Kabupaten Pulau Morotai.

Sehubungan dengan konsep wisata bahari dan kenyataan bahwa wisata layar memanfaatkan wilayah laut sebagai *areal* jelajahnya, maka dapat dikemukakan bahwa konsep wisata layar dalam penelitian ini mencakup beberapa hal. Pertama, wisata layar dikategorikan sebagai salah satu bagian atau jenis dari wisata bahari. Kedua, wisata layar mencakup aktivitas wisatawan (*travellers/Sailors/yachters*) yang menggunakan kapal wisata (*yacht*) dan mengunjungi destinasi wisata layar untuk melakukan aktivitas wisata baik di laut dan di darat, maupun yang singgah tanpa aktivitas wisata di darat.

Berdasarkan pemahaman akan konsep wisata layar sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, maka konsep destinasi wisata layar dalam penelitian ini adalah destinasi yang secara nyata dikunjungi kapal wisata (*yacht*) dan ada

aktivitas pemangku kepentingan pariwisata di destinasi yang dipicu oleh kehadiran kapal wisata itu.

2.2. Wisata Layar Sebagai Pariwisata Alternatif

Dalam upaya memahami perkembangan destinasi wisata secara umum, maka penelitian ini juga mengadaptasi kerangka atribut destinasi 6A dari Buhalis (2000:98). Buhalis menunjukkan bahwa destinasi wisata terdiri dari beberapa komponen inti. Ia mengkategorikan komponen-komponen ini ke dalam kerangka 6A. Pertama, atraksi (*attractions*) yang meliputi alam, buatan, bangunan artifisial, dan *event* khusus. Dalam penelitian ini atraksi mencakup alam, budaya, dan buatan manusia. Kedua, aksesibilitas (*accessibility*) yang meliputi sistem transportasi, terminal, dan moda transportasi. Ketiga, amenitas (*amenities*) terdiri dari akomodasi, *catering*, ritel dan jasa wisata lainnya. Keempat, paket wisata yang tersedia (*available packages*) yaitu paket-paket wisata yang telah disiapkan oleh *tour operator* atau biro perjalanan. Kelima, aktivitas (*activities*) yakni semua kegiatan yang dapat dilakukan oleh wisatawan ketika berada di destinasi. Keenam, *ancillary services* mengacu kepada bank, telekomunikasi, jasa pos, rumah sakit, dan lain-lain. Dengan demikian, dalam penelitian ini kerangka 6A dari Buhalis diadaptasi untuk memahami karakteristik destinasi singgah Kabupaten Pulau Morotai.

Pengelolaan destinasi singgah *Sail* Indonesia merupakan aktivitas yang dilakukan oleh berbagai pihak. Bentuk pengelolaannya umumnya didasarkan pada panduan tertentu. Panduan itu dibuat oleh pengelola *Sail* Indonesia berdasarkan kebutuhan dasar para peserta reli dan aktivitas wisata yang dapat dilakukan sesuai dengan kondisi destinasi singgah. Pengelolaannya antara lain mencakup aksesibilitas ke darat misalnya pada destinasi tertentu disiapkan *floating jetty* (dermaga apung). Pemenuhan kebutuhan makan dan minum misalnya melalui penyediaan restoran khusus selama acara berlangsung atau dengan memanfaatkan restoran-restoran yang sudah tersedia. Penyelenggaraan perjalanan wisata di darat dalam bentuk paket wisata, baik yang disiapkan oleh *tour operator* maupun yang dilakukan oleh kelompok masyarakat. Di samping itu, juga disiapkan sarana *humaniter* seperti toilet di sejumlah tempat yang terkait. Prinsip pengelolaannya adalah memberikan kenyamanan bagi para tamu yang datang dengan melibatkan pemangku kepentingan setempat (Disbudpar, 2009).

Pola ini memungkinkan pengelolaan antara masing-masing destinasi menjadi berbeda. Perbedaan itu merupakan karakter yang menjadi ciri khas

masing-masing destinasi singgah, sehingga pengelolaannya menjadi sesuatu yang perlu dicermati. Untuk maksud itu, maka konsep pengelolaan yang mendasari kajian dalam penelitian ini mencakup: (a) penataan titik labuh (*anchorage area*); (b) aksesibilitas ke darat; (c) penataan areal titik labuh di darat; (d) penyelenggaraan aktivitas perjalanan wisata di darat; (e) penyelenggaraan pagelaran atraksi seni dan budaya daerah; dan (f) partisipasi pemangku kepentingan dalam seluruh penanganan itu.

Keseluruhan bentuk pengelolaan dan partisipasi pemangku kepentingan dalam pengelolaan itu dapat dipandang sebagai sebuah bentuk aktivitas pariwisata alternatif. Secara umum pariwisata alternatif merupakan pilihan lain dari konsep *mass tourism*. Menurut Smith & Eadington (1992:3) pariwisata alternatif adalah bentuk pariwisata yang konsisten dengan nilai-nilai alam, sosial dan nilai-nilai masyarakat serta memungkinkan baik masyarakat lokal maupun wisatawan untuk menikmati interaksi yang positif serta bermanfaat dan menikmati pengalaman secara bersama-sama. Penghargaan terhadap nilai alam, sosial, dan kearifan lokal menjadi ciri utama pariwisata alternatif. Model pariwisata alternatif ini memungkinkan terjalinnya kebersamaan atau relasi yang positif dengan pengunjung atau wisatawan. Artinya, masyarakat lokal menjadi subjek yang berperan penuh dan penting.

Bila diuraikan lebih lanjut maka pariwisata alternatif mencakup beberapa pengertian. Pertama, pariwisata alternatif diaplikasikan pada pariwisata yang tidak merusak lingkungan, berbasis ekologis, dan menghindari dampak negatif dari pengembangan pariwisata berskala besar di daerah wisata yang belum berkembang. Kedua, pariwisata alternatif merupakan proses pengembangan bentuk perjalanan yang berbeda dan yang berupaya menciptakan adanya saling pemahaman, solidaritas, dan persamaan di antara para peserta yang ikut dalam perjalanan wisata tertentu. Ketiga, pariwisata alternatif mencakup pengembangan atraksi bagi wisatawan yang berskala kecil yang dilakukan dan dikelola oleh masyarakat lokal.

Istilah alternatif juga mengandung makna sesuatu yang beda, sebagai pilihan lain dari sesuatu yang telah ada. Fandeli (2002: 104) menyebutkan bahwa pariwisata alternatif hadir sebagai akibat kebosanan wisatawan karena menikmati atraksi yang sama dari waktu ke waktu. Mereka ingin memperoleh sesuatu yang lain. Wisata layar dipahami sebagai salah satu bentuk aktivitas wisata yang dapat dikembangkan di Kabupaten Pulau Morotai sebagai pariwisata

alternatif. Para wisatawan yang datang dengan kapal-kapal wisata melakukan aktivitas wisata tidak hanya di laut tetapi dan terutama di darat. Pemanfaatan aktivitas ini sangat mungkin dilakukan dengan menerapkan prinsip-prinsip pariwisata alternatif. Dengan kalimat lain, wisata layar sebagai salah satu bentuk pariwisata alternatif menjadi akses atau pemicu bagi pengembangan pariwisata alternatif di darat (*land-based tourism*).

2.3. Objek Wisata

Obyek Wisata adalah segala sesuatu yang ada di daerah tujuan wisata yang merupakan daya tarik agar orang-orang mau datang berkunjung ke tempat tersebut. Obyek Wisata adalah semua tempat atau keadaan alam yang memiliki sumber daya wisata yang dibangun dan dikembangkan sehingga mempunyai daya tarik dan diusahakan sebagai tempat yang dikunjungi wisatawan. Obyek wisata dapat berupa wisata alam seperti gunung, danau, sungai, pantai, laut, atau berupa obyek bangunan seperti museum, benteng, situs peninggalan sejarah, dan lain-lain (SK. MENPARPOSTEL No.: KM. 98 / PW.102 / MPPT-87). Suatu tempat/daerah agar dapat dikatakan sebagai objek wisata harus memenuhi hal pokok berikut:

1. Adanya *something to see*, Maksudnya adalah sesuatu yang menarik untuk dilihat.
2. Adanya *something to buy*, Maksudnya adalah sesuatu yang menarik dan khas untuk dibeli.
3. Adanya *something to do*, Maksudnya adalah sesuatu aktivitas yang dapat dilakukan di tempat itu.

Umumnya di beberapa daerah atau negara, untuk memasuki suatu objek wisata para wisatawan diwajibkan untuk membayar biaya masuk atau karcis masuk yang merupakan biaya retribusi untuk pengembangan dan peningkatan kualitas objek wisata tersebut. Beberapa objek wisata ada yang dikelola oleh Pemerintah dan adapula yang dikelola oleh pihak swasta. Objek wisata yang dikelola oleh pihak swasta dapat berupa objek wisata alami maupun buatan.

2.4. Daya Tarik Wisata

Destinasi Pariwisata adalah area atau kawasan geografis yang berbeda dalam suatu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat unsur:

daya tarik wisata, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, masyarakat serta wisatawan yang saling terkait dan melengkapi untuk terwujudnya kegiatan kepariwisataan.

Daya tarik yang tidak atau belum dikembangkan merupakan sumber daya potensial dan belum dapat disebut daya tarik wisata, sampai adanya suatu jenis pengembangan tertentu. Objek dan daya tarik wisata merupakan dasar bagi kepariwisataan. Tanpa adanya daya tarik di suatu daerah atau tempat tertentu kepariwisataan sulit untuk dikembangkan.

Daya Tarik Wisata sejatinya merupakan kata lain dari obyek wisata namun sesuai peraturan pemerintah Indonesia tahun 2009 kata obyek wisata sudah tidak relevan lagi untuk menyebutkan suatu daerah tujuan wisatawan maka digunakanlah kata “Daya Tarik Wisata” maka untuk mengetahui apa arti dan makna dari daya tarik wisata di bawah ini adalah beberapa definisi/pengertian mengenai DayaTarik Wisata menurut beberapa ahli:

1. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 tahun 2009, Daya Tarik Wisata dijelaskan sebagai segala sesuatu yang memiliki keunikan, kemudahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau kunjungan wisatawan.
2. A. Yoeti dalam bukunya “Pengantar Ilmu Pariwisata” tahun 1985 menyatakan bahwa daya tarik wisata atau “tourist attraction”, istilah yang lebih sering digunakan, yaitu segala sesuatu yang menjadi daya tarik bagi orang untuk mengunjungi suatu daerah tertentu.
3. Nyoman S. Pendit dalam bukunya “Ilmu Pariwisata” tahun 1994 mendefinisikan daya tarik wisata sebagai segala sesuatu yang menarik dan bernilai untuk dikunjungi dan dilihat.

Dari beberapa pengertian di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang mempunyai daya tarik, keunikan dan nilai yang tinggi, yang menjadi tujuan wisatawan datang ke suatu daerah tertentu.

1. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang menjadi tujuan kunjungan wisatawan.
2. Daya Tarik Wisata adalah sifat yang dimiliki oleh suatu obyek berupa keunikan, keaslian, kelangkaan, lain dari pada yang lain memiliki sifat yang menumbuhkan semangat dan nilai bagi wisatawan” (budpar)

3. Daya tarik wisata adalah suatu bentukan dan fasilitas yang berhubungan, yang dapat menarik minat wisatawan atau pengunjung untuk datang ke suatu daerah atau tempat tertentu.
4. Dalam UU No. 9 tahun 1990 tentang kepariwisataan disebutkan bahwa daya tarik wisata adalah suatu yang menjadi sasaran wisata terdiri atas:
 - a. Daya tarik wisata ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang berwujud keadaan alam, flora dan fauna.
 - b. Daya tarik wisata hasil karya manusia yang berwujud museum, peninggalan sejarah, seni dan budaya, wisata agro, wisata buru, wisata petualangan alam, taman rekreasi dan komplek hiburan.
 - c. Daya tarik wisata minat khusus, seperti: berburu, mendaki gunung, gua, industri dan kerajinan, tempat perbelanjaan, sungai air deras, tempat-tempat ibadah, tempat ziarah dan lain-lain.

2.5. Pengertian Evaluasi

Evaluasi adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang bekerjanya sesuatu, yang selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternatif yang tepat dalam mengambil keputusan. Fungsi utama evaluasi dalam hal ini adalah menyediakan informasi-informasi yang berguna bagi pihak *decision maker* untuk menentukan kebijakan yang akan diambil berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan Menurut Suharsimi Arikunto (2004:1).

Evaluasi adalah mencari sesuatu yang berharga (*worth*). Sesuatu yang berharga tersebut dapat berupa informasi tentang suatu program, produksi serta alternatif prosedur tertentu. Karenanya evaluasi bukan merupakan hal baru dalam kehidupan manusia sebab hal tersebut senantiasa mengiringi kehidupan seseorang. Seorang manusia yang telah mengerjakan suatu hal, pasti akan menilai apakah yang dilakukannya tersebut telah sesuai dengan keinginannya semula (Worthen dan Sanders, 1979:1).

Evaluasi adalah: *process of delineating, obtaining and providing useful information for judging decision alternatives*. Dalam evaluasi ada beberapa unsur yang terdapat dalam evaluasi yaitu: adanya sebuah proses (*process*) perolehan (*obtaining*), penggambaran (*delineating*), penyediaan (*providing*) informasi yang berguna (*useful information*) dan alternatif keputusan (*decision alternatives*), (Stufflebeam dalam Worthen dan sanders (1979:129)

Dari pengertian-pengertian tentang evaluasi yang telah dikemukakan beberapa orang di atas, kita dapat menarik benang merah tentang evaluasi yakni evaluasi merupakan sebuah proses yang dilakukan oleh seseorang untuk melihat sejauh mana keberhasilan sebuah program. Keberhasilan program itu sendiri dapat dilihat dari dampak atau hasil yang dicapai oleh program tersebut. Karenanya, dalam keberhasilan ada dua konsep yang terdapat didalamnya yaitu efektifitas dan efisiensi. Efektifitas merupakan perbandingan antara output dan inputnya sedangkan efisiensi adalah taraf pendayagunaan input untuk menghasilkan output lewat suatu proses (Sudharsono1994:2)

2.5.1. Tujuan dan Manfaat Evaluasi

Evaluasi ditujukan untuk menganalisa dampak pembangunan yang dilakukan oleh para pelaku pembangunan dan dinikmati oleh penerima manfaat pembangunan. Jadi evaluasi sama sekali berbeda dengan jenis penilaian kebijakan. Seyogyanya, evaluasi tidak hanya terdiri dari analisa kuantitatif atas dampak dari pelaksanaan kebijakan, tapi juga mencakup penjelasan mengenai ketercapaian atau ketidaktercapaian, serta uraian mengenai implikasi kebijakan yang mungkin terjadi.

Idealnya, suatu kegiatan evaluasi pembangunan sektoral mencakup berikut:

- 1) Studi proses, dimana operasi dan kinerja pembangunan sektoral dan prosesnya dikaji
- 2) Studi dampak, inti teknis capaian evaluasi pembangunan sektoral
- 3) Penilaian biaya-manfaat, yang menunjukkan efektifitas pelaksanaan pembangunan sektoral.

Adapun manfaat pelaksanaan evaluasi adalah:

- 1) Memberikan umpan balik terhadap pelaksanaan pembangunan sektoral.
- 2) Bentuk akuntabilitas pelaksanaan pembangunan sektoral karena dibiayai oleh dana publik.
- 3) Membantu pemangku kepentingan untuk belajar mendalam dan menghayati kebijakan dan kegiatan pembangunan sektoral.

2.5.2. Komponen Kunci Evaluasi yang Baik

Di bawah ini disajikan dua kelompok kriteria evaluasi yang baik. Untuk hasil yang bermanfaat 7 (tujuh) kriteria konsep evaluasi harus terpenuhi.

Disamping itu, 6 prinsip untuk memantapkan berbagai aspek pelaksanaan evaluasi, sehingga evaluasi yang dilakukan akan berkualitas.

Untuk menghasilkan manfaat yang maksimal, suatu proses evaluasi harus memiliki kriteria konsep sebagai berikut:

1. Tujuan yang jelas. Tujuan evaluasi di tentukan lebih awal, sederhana dan mudah diukur.
2. Metodologi yang tepat. Penggunaan metodologi disesuaikan dengan maksud dan tujuan pelaksanaan evaluasi.
3. Keandalan (*reliable*). Keandalan dari suatu proses evaluasi dinilai dari perolehan hasil yang setara untuk berbagai kondisi yang dapat diperbandingkan. Dengan demikian, faktor-faktor subyektifitas (seperti karakteristik individu para *reviewer*, penafsiran dan penilaian yang tidak berdasar, dsb) dalam pelaksanaan evaluasi dapat dihilangkan atau paling tidak diminimalisir.
4. Transparan. Transparansi evaluasi bergantung pada sejauh mana pihak yang terlibat memahami dengan baik proses pelaksanaannya. Ini mengenai tujuan, alasan maupun hasil yang diharapkan.
5. Dapat dipercaya (*credible*). Tingkat kredibilitas suatu proses evaluasi sangat bergantung pada tingkat validitas hasil proses evaluasi proses tersebut. Oleh karena itu, kecermatan dalam mengukur capaian sesuai sasaran dan indikator yang telah ditetapkan, mengukur kewajaran dalam budget untuk pembiayaan implimentasi kegiatan pembangunan. Serta keterbukaan ketika menyelenggarakan evaluasi merupakan faktor penting dan perlu diperhatikan.
6. Tingkat komprehensifitas (*comprehensiveness*). Tingkat komprehensif dari suatu proses evaluasi sangat bergantung kepada kesesuaian jumlah objek yang diamati dan kesesuaian jumlah sampel responden.
7. Efektifitas (*Effectiveness*) efektifitas proses evaluasi yang berkualitas bergantung pada sejauh mana dampak dari proses tersebut menyebabkan perubahan dan perbaikan yang berkesinambungan (*continuous improvement*), termasuk peluang perubahan dan ketersediaan informasi.

2.6. Pengertian Daerah

Menurut Lincoln Arsyad dalam bukunya yang berjudul Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah, pengertian daerah berbeda-beda

tergantung aspek ditinjaunya. Dari aspek ekonomi, daerah mempunyai tiga pengertian yaitu (Arsyad, 1999 : 107-108) :

- a. Suatu daerah dianggap sebagai ruang dimana kegiatan ekonomi terjadi di daerah dan di dalam berbagai pelosok ruang tersebut terdapat sifat-sifat yang sama. Kesamaan sifat-sifat tersebut antara lain dari segi pendapatan perkapitanya, budayanya geografisnya, dan sebagainya. Daerah dalam pengertian seperti ini disebut daerah homogen.
- b. Suatu daerah dianggap sebagai suatu ekonomi ruang yang dikuasai oleh satu atau beberapa pusat kegiatan ekonomi yang disebut daerah modal.
- c. Suatu daerah adalah suatu ekonomi ruang yang berada di bawah satu administrasi tertentu seperti satu propinsi, kabupaten, kecamatan dan sebagainya. Jadi daerah di sini didasarkan pada pembagian administrasi suatu Negara. Disebut sebagai daerah perencanaan atau daerah administrasi.

2.7. Pengertian Pembangunan Daerah

Pembangunan daerah adalah seluruh pembangunan yang dilaksanakan di daerah dan meliputi aspek kehidupan masyarakat, dilaksanakan secara terpadu dengan mengembangkan swadaya gotong royong serta partisipasi masyarakat secara aktif. Dalam hubungan ini pembangunan daerah diarahkan untuk memanfaatkan secara maksimal potensi sumber daya alam dan mengembangkan sumber daya manusia dengan meningkatkan kualitas hidup, keterampilan, prakarsa dengan bimbingan dan bantuan dari pemerintah. Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumberdaya-sumberdaya yang ada dan bersama sama mengambil inisiatif pembangunan daerah. Oleh karena itu pemerintah daerah beserta partisipasi masyarakatnya dan dengan menggunakan sumberdaya-sumberdaya yang ada harus mampu menaksir potensi sumberdaya-sumberdaya yang diperlukan untuk merancang dan membangun perekonomian daerah. Dengan demikian ciri pokok pembangunan daerah adalah:

- a. Meliputi seluruh aspek kehidupan
- b. Dilaksanakan secara terpadu
- c. Meningkatkan swadaya masyarakat

2.7.1. Tujuan Pembangunan Daerah

Pembangunan daerah dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, baik jangka panjang maupun jangka pendek. Tujuan pembangunan jangka pendek adalah menunjang atau mendukung keberhasilan pembangunan proyek-proyek penunjang daerah. Tujuan pembangunan jangka panjang adalah mengembangkan seluruh desa di Indonesia menjadi desa swasembada melalui tahap-tahap desa swadaya dan swakarya dan memperhatikan keserasian pembangunan daerah pedesaan dan daerah perkotaan, imbangannya kewajiban antara pemerintah dan masyarakat serta keterpaduan yang harmonis antara program sektoral atau regional dengan partisipasi masyarakat yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat dalam rangka pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia (Sudirwo, 1981:64)

2.7.2. Bentuk Pembangunan Daerah

Secara umum pembangunan desa berbentuk pembangunan fisik dan pembangunan nonfisik atau mental spiritual. Pembangunan fisik dapat berupa pembangunan sarana dan prasarana, misalnya: jembatan, gorong-gorong, kebun percontohan, MCK, sarana ibadah, dan lain-lain. Sedangkan pembangunan nonfisik berupa pemberian kursus, penyuluhan tentang kesehatan, kewirausahaan, penyuluhan tentang hidup sehat dan lain-lain.

Pembangunan Daerah merupakan suatu usaha yang sistematis dari berbagai pelaku, baik umum, pemerintah, swasta, maupun kelompok masyarakat lainnya pada tingkatan yang berbeda untuk menghadapi saling ketergantungan dan keterkaitan aspek fisik, sosial ekonomi dan aspek lingkungan lainnya sehingga peluang baru untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah dapat ditangkap secara berkelanjutan. Hal ini dapat ditempuh secara terus menerus menganalisis kondisi dan pelaksanaan pembangunan daerah, di antaranya adalah:

- 1) Merumuskan tujuan dan kebijakan pembangunan daerah
- 2) Menyusun konsep strategi bagi pemecahan masalah (solusi)
- 3) Melaksanakannya dengan menggunakan sumber daya yang tersedia
- 4) Tujuan Pembangunan Daerah
- 5) Mengurangi dispersi atau ketimpangan pembangunan antara daerah dan sub daerah serta antara warga masyarakat (pemerataan dan keadilan).
- 6) Memberdayakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan

- 7) Menciptakan lapangan kerja.
- 8) Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat daerah.
- 9) Mempertahankan atau menjaga kelestarian sumber daya alam agar bermanfaat bagi generasi sekarang dan generasi berkelanjutan.

Masalah pembangunan daerah yang dihadapi oleh Negara-negara yang sedang berkembang adalah sebagai berikut:

- 1) Sistem pertanian yang masih tradisional
- 2) Kurangnya dana modal dan modal fiskal
- 3) Peranan tenaga terampil dan berpendidikan
- 4) Pesatnya perkembangan penduduk
- 5) Kebijakan Mempercepat Pembangunan
- 6) Kebijakan diversifikasi kegiatan ekonomi
- 7) Mengembangkan infrastruktur
- 8) Meningkatkan tabungan dan investasi
- 9) Meningkatkan taraf pendidikan masyarakat
- 10) Mengembangkan institusi yang mendorong pembangunan
- 11) Merumuskan dan melaksanakan perencanaan ekonomi

2.8. Definisi Operasional

Pada subbab menjelaskan mengenai definisi operasional yang terdiri dari definisi judul pada studi, dan definisi lainnya yang bersangkutan dengan lingkup kajian.

(1). Evaluasi

Secara umum, pengertian evaluasi adalah suatu proses untuk menyediakan informasi tentang sejauh mana suatu kegiatan tertentu telah dicapai, bagaimana perbedaan pencapaian itu dengan suatu standar tertentu untuk mengetahui apakah ada selisih di antara keduanya, serta bagaimana manfaat yang telah dikerjakan itu bila dibandingkan dengan harapan-harapan yang ingin diperoleh. Dalam pengertian yang lain, evaluasi adalah suatu proses yang sistematis untuk menentukan atau membuat keputusan, sampai sejauh mana tujuan program telah tercapai. Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Wrightstone, dkk (1956) yang mengemukakan bahwa pengertian evaluasi adalah penaksiran terhadap pertumbuhan dan kemajuan ke arah tujuan atau nilai-nilai yang telah ditetapkan.

(2). Kemanfaatan

Hasil atau faedah dari suatu kegiatan/program yang menguntungkan karena penyelenggaraan kegiatan/program tersebut, serta dapat dirasakan manfaatnya secara langsung baik perorangan maupun keseluruhan pihak yang terlibat dalam program atau pelaksanaan kegiatan yang telah selesai. manfaat yang langsung dapat dinikmati karena adanya investasi, yang dapat berupa kenaikan fisik hasil produksi, perbaikan kualitas produksi, dan penurunan biaya.

(3). Sail Indonesia

Sail Indonesia adalah kegiatan reli kapal wisata (*yacht*) internasional di perairan Indonesia dan menyinggahi sejumlah destinasi wisata layar yang berada di sepanjang rute reli. Pesertanya berasal dari sejumlah negara dan dimulai dengan *Darwin-Kupang Rally* pada tahun 2003. Acara ini menjadi reli layar pertama yang berkaitan erat dengan acara Lomba Layar Darwin-Dili dan Darwin-Ambon. Sejak tahun 2005, nama *Darwin-Kupang Rally* diganti dengan nama *Sail Indonesia* hingga kini.

(4). Akselerasi

Proses mempercepat; peningkatan kecepatan; percepatan; laju perubahan kecepatan. Akselerasi adalah proses untuk mempercepat suatu usaha pembangunan guna untuk dapat menjalankan fungsi dan tugas dari masing-masing daerah secara terencana dan jelas pembangunannya ke masa yang akan datang.

(5). Pembangunan

Pembangunan adalah semua proses perubahan yang dilakukan melalui upaya-upaya secara sadar dan terencana. Sedangkan perkembangan adalah proses perubahan yang terjadi secara alami sebagai dampak dari adanya pembangunan (Riyadi dan Deddy Supriyadi Bratakusumah, 2005). Portes (1976) mendefinisikan pembangunan sebagai transformasi ekonomi, sosial dan budaya. Pembangunan adalah proses perubahan yang direncanakan untuk memperbaiki berbagai aspek kehidupan masyarakat. Berikut adalah pengertian pembangunan menurut beberapa ahli antara lain:

a. Menurut (Rogers)

Suatu proses perubahan sosial dengan partisipatori yang luas dalam suatu masyarakat yang dimaksudkan untuk kemajuan sosial dan material (termasuk bertambah besarnya kebebasan, keadilan dan

kualitas lainnya yang dihargai) untuk mayoritas rakyat melalui kontrol yang lebih besar yang mereka peroleh terhadap lingkungan mereka.

b. Menurut (Riyadi dan Deddy Supriyadi Bratakusumah, 2005)

Proses perubahan yang terus menerus untuk menuju keadaan yang lebih baik berdasarkan norma-norma tertentu. Mengenai pengertian pembangunan, para ahli memberikan definisi yang bermacam-macam seperti halnya perencanaan. Istilah pembangunan bisa saja diartikan berbeda oleh satu orang dengan orang lain, daerah yang satu dengan daerah lainnya, Negara satu dengan Negara lain. Namun secara umum ada suatu kesepakatan bahwa pembangunan merupakan proses untuk melakukan perubahan.

c. Siagian (1994)

Suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation building*).

(6) Daerah

Dalam arti fisik keruangan, wilayah dan daerah mempunyai pengertian yang sama sebagai terjemahan dari region, suatu hamparan luas sebagai kumpulan dari lokasi-lokasi (*sites*) atau areal-areal (*areas*), baik mencakup ciri perkotaan maupun perdesaan. Penggunaan istilah wilayah atau daerah digunakan untuk dua keadaan yang berbeda, yaitu sebagai berikut:

a. Untuk menyatakan adanya kondisi geografis yang homogen

Contohnya, wilayah/daerah pesisir, wilayah/daerah rawa, wilayah/daerah pertanian, dan sebagainya. Penggunaan istilah wilayah di sini sering berhubungan dengan proses evaluasi potensi suatu kota atau daerah sebagai bahan perencanaan. Para ahli geografi menyebutkan wilayah dengan dasar homogenitas sebagai wilayah formal.

b. Untuk menyatakan adanya kelompok fungsional.

Contohnya, wilayah/daerah pelayanan, wilayah/daerah pemasaran, dan sebagainya. Para ahli geografi menyebutkan wilayah dengan dasar kelompok fungsional sebagai wilayah fungsional. Pada pengertian ini dikenal adanya pusat kegiatan (*nodes*) dan *hinterland*-nya. Antara pusat kegiatan dan *hinterland*-nya terdapat struktur atau jaringan yang secara fisik tampak dan ada juga yang maya. Misalnya, wilayah pelayanan air

minum ditunjukkan adanya jaringan pipa air minum yang menghubungkan pusat kegiatan dengan *hinterland*-nya. Sedangkan wilayah pelayanan pendidikan suatu perguruan tinggi tidak dihubungkan oleh suatu jaringan fisik ke pengguna jasa pendidikan (asal mahasiswa), tetapi berupa orbitasi pergerakan manusia asal mahasiswa ke kampus perguruan tinggi tersebut.

Berdasarkan pengertian dari masing-masing kata di atas dapat ditarik suatu pengertian bahwa Evaluasi Kemanfaatan *Sail* Indonesia Untuk Akselerasi Pembangunan Daerah di Kabupaten Pulau Morotai adalah melihat kembali atau melakukan studi perbandingan (komparasi) terhadap masa dimana sebelum pelaksanaan *Sail* Indonesia dan sesudah pelaksanaan *Sail* Indonesia Untuk melihat kemanfaatan terhadap faktor fisik seperti jalan, jembatan, faktor sosial-ekonomi dan pariwisata untuk menunjang aktifitas dan ekonomi masyarakat. apakah berpengaruh atau tidaknya terhadap Faktor-faktor seperti Fisik, Sosial-Ekonomi dan Pariwisata.